

ABSTRAK

Tia Euis Masruroh, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lapas Kelas II B Tasikmalaya Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidieum* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Mengingat jumlah residivis yang terus bertambah, Pemasasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap Pembina dengan sistem pemasasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pembinaan narapidana residivis dalam rangka mencegah pengulangan kembali tindak pidana, mengetahui dan mengkaji kendala dalam melaksanakan pembinaan narapidana residivis dalam rangka mencegah pengulangan kembali tindak pidana, dan mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi pada pembinaan narapidana residivis tersebut..

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini berupa pendekatan *yuridis empiris*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya studi pustaka dan penelitian lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis yang berlandaskan pada Surat Edaran No. KP. 10. 13/ 3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang "Pemasasyarakatan sebagai Proses". Maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilakukan melalui tahap pertama/ tahap orientasi, tahap kedua/ tahap asimilasi arti sempit, tahap ketiga/ tahap asimilasi arti luas, dan tahap keempat/ tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat. Kendala yang dihadapi di Lapas Kelas II B Tasikmalaya terdiri dari kendala eksternal tidak seimbangannya petugas Lapas dengan warga binaan pemasasyarakatan yang mengalami *overload*, dan kendala internal kurangnya peran masyarakat yang membuat narapidana merasa terbuang. Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B Tasikmalaya, dalam menghadapi kendala internal, dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan dalam menghadapi kendala eksternal, diharapkan adanya peran pemerintah, yakni dengan pemberian penyuluhan atau kampanye sebagai informasi dasar kepada masyarakat juga merupakan tindakan preventif agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan kembali.